



Kolaborasi Pemerintah dalam Mewujudkan Transportasi Hijau di Kota Pekanbaru

M. Fajar Anugerah^{1✉} Mhd. Rafi Yahya², Widiyati³

Universitas Abdurrah

Email: fajar.anugerah@univrab.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kolaborasi Pemerintah dalam mewujudkan Transportasi Hijau di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisa secara kualitatif. Adapun Teknik menentukan Informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan pembuatan perda yang berbunyi Pemerintah Daerah Kota Wajib Menyediakan 5% Dari Anggaran APBD. Dinas Perhubungan juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak yang dimana Dinas Perhubungan dalam Kerjasamanya Bersama Pemerintahan Kawasaki Jepang mendapatkan kajian-kajian mengenai Eco transport dengan menggunakan gas melalui limbah kelapa sawit. Namun dalam mewujudkan transportasi hijau Dinas Perhubungan masih harus melakukan pembenahan dimana-mana dan membutuhkan investasi yang cukup besar. Strategi program meliputi program TUMI Mentee Cities Indonesia untuk mewujudkan transportasi hijau di Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perhubungan melibatkan peran Pemerintah, Swasta dan juga Masyarakat dalam mewujudkan transportasi hijau.

Kata Kunci: *Kolaborasi, Pemerintah, Transportasi Hijau*

Abstract

The purpose of this research is to find out how Government Collaboration in realising Green Transportation in Pekanbaru City. This research uses qualitative research methods. Types and sources of data in this study are primary data and secondary data obtained by using interviews and documentation, then analysed qualitatively. using interviews and documentation, then analysed qualitatively. The technique of determining informants using purposive sampling. The results of This research shows that the Department of Transportation has made local regulation which reads that the City Government is obliged to provide 5% of the APBD budget. APBD. The Department of Transportation has also collaborated with several parties which the Department of Transportation in cooperation with the Kawasaki Government Japan got studies on Eco transport using gas through palm oil waste. through palm oil waste. However, in realising green transport the Department of Transportation Transportation Department still has to make improvements everywhere and requires considerable investment. Programme strategies include the TUMI Mentee Cities Indonesia to realise green transportation in Pekanbaru City in this case the Transportation Agency involves the role of Government, Private and also In this case the Transportation Agency involves the role of Government, Private and also Society in realising green transport.

Keywords: *Collaboration, Government, Green Transportation*

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Perkotaan terbagi menjadi 3 yaitu: a. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah b. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk c. Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu. Ruang Terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang Terbuka, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (Muthia, 2018).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi kebutuhan suatu Kota yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan hidup. Ruang terbuka hijau bermanfaat sebagai paru-paru kota dan sebagai daerah resapan air, penyaring polusi udara, penurun tingkat kebisingan, tempat rekreasi dan habitat berbagai satwa terutama burung. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur penting yang dapat mengendalikan kualitas lingkungan perkotaan (Handoyo, F., Hakim, L., & Leksono, 2016).

Kota Hijau (*green city*) juga dapat di sebut kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) atau eco-city (Nugroho & Syaodih, 2013) menyatakan bahwa Kota hijau adalah sebuah Kota dengan kondisi ekosistem berkeselimbangan sehingga fungsi dan manfaatnya berkelanjutan. Kota Hijau merupakan respon terhadap isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi dalam pengembangan Kota Hijau juga dimaksudkan pembangunan manusia Kota yang berinisiatif dan bekerjasama dalam melakukan perubahan dan gerakan bersama seluruh unsur pemangku kepentingan Kota. Perwujudan Kota Hijau di jabarkan dalam delapan atribut Kota Hijau yang meliputi : (1) perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan (*Green Planning and Design*), (2) ketersediaan ruang terbuka hijau (*Green Open Space*), (3) konsumsi energi yang efisien (*Green Energi*), (4) pengelolaan air yang efektif (*Green Water*), (5) pengelolaan limbah dengan prinsip 3R (*Green Waste*), (6) bangunan hemat energi atau bangunan hijau (*Green Building*), (7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan (*Green Transportation*), dan (8) peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau (*Green Community*).

Kota Pekanbaru menyadari pentingnya ruang terbuka hijau yang dimana telah diamanatkan Dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca dan Peraturan Menteri Perhubungan Sebagai Dasar Hukum Implementasi Program Transportasi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan (*Environmentally Sustainable Transport-EST*), dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 2 Tentang Penataan Ruang.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (2017-2022) ini ditunjukan memiliki visi misi yang dimana visi nya yaitu: "Penataan kota dan penyediaan infrastruktur yang memadai guna menunjang pengembangan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu, di dukung dengan pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perbaikan sumber daya manusia" dan misinya yaitu : "Mewujudkan Lingkungan Perkotaan Yang Ramah Lingkungan (*Green City*)" yang memiliki sasaran untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup menuju lingkungan yang cerdas (*Smart Environment*) (Fajar & Sujianto, 2016).

Fenomena yang terjadi dalam mewujudkan transportasi hijau di Kota Pekanbaru pertama yakni Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat menyebabkan kota menjadi panas dan berdebu yang dimana RTH di Pekanbaru hanya sekitar 6.817,42 ha atau 126,452 km² atau hanya sekitar 20% dari luas administrasi kota, kondisi transportasi umum yang dimana Trans Metro Pekanbaru hanya beroperasi beberapa unit, regulasi perparkiran

dengan penerapan *Green Parking* area dapat membantu mengatasi masalah kurangnya lahan untuk ruang terbuka hijau dengan mengubah pola pikir masyarakat dengan mengelola parkir yang baik dan ramah lingkungan dapat mendukung transportasi hijau dan peningkatan volume kendaraan yang dimana setiap tahunnya dengan presentasi sekitar 21% dari jumlah kendaraan bermotor dan frekuensi bebas kendaraan hanya 4-6 jam/minggu. Jumlah kendaraan bermotor di pekanbaru sendiri pada kendaraan jenis mobil penumpang memiliki 800.000 dan sepeda motor 1.000.000 yang dimana ini mempengaruhi kualitas udara ambien (sumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru).

Tabel 1. Kualitas Udara 3 tahun terakhir di Kota Pekanbaru

	PM10	SO2	CO	O3	NO2	PM2.5	HC
Maksimum/Maximum	43,63	28,60	323,46	164,45	6,80	44,51	-
Percentile 95%	105,26	105,26	105,26	78,10	105,26	105,26	-
2021	Kualitas: Sedang						
Maksimum/Maximum	43,85	34,00	4.694,81	103,00	200,00	40,50	67,63
Percentile 95%	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26
2022	Kualitas: Sedang						
Maksimum/Maximum	32,15	61,88	1.706,64	214,33	86,90	26,40	1,00
Percentile 95%	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26
2023	Kualitas: Sedang						

(Sumber: Laboratorium Udara DLHK Kota Pekanbaru 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kualitas udara dari tahun ke tahun. Dalam pemaparan TIM (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle) IMT-GT menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru masih harus melakukan pembenahan dimana-mana untuk mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan bagi masyarakat. Dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH) Pekanbaru memiliki kemampuan daya serap CO₂ sebesar 29.013,30 ton/tahun, dengan presentasi penyerapan sebesar 50,56%. Dengan ini menunjukkan bahwa transportasi hijau memiliki peran penting dalam mengurangi emisi GRK dengan mengurangi kendaraan non-motor dan meningkatkan pengguna transportasi umum. Adapun faktor emisi default yang digunakan dalam perhitungan emisi CO₂ di Kota Pekanbaru adalah 69.300 Kg CO₂/TJ untuk BBM jenis premium dan pertamax dan 74.100 Kg CO₂/TJ untuk BBM jenis Solar.

Untuk mewujudkan transportasi hijau Kota Pekanbaru tidak lepas dari sarana prasarana pendukung dalam mewujudkan transportasi masal yang ramah lingkungan. Trans

Metro Pekanbaru (TMP) juga memiliki peran penting untuk sumbangsih mewujudkan cita-cita bersama pemerintah dan masyarakat ini. Potret keberadaan unit maupun halte TMP menjadi makna penting guna mempercepat transportasi hijau di kota ini. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2023 memiliki 15 jalur trans metro pekanbaru dan 7 diantaranya koridor tersebut mati atau tidak berfungsi, sedangkan untuk armada bus sampai dengan tahun 2023 sebanyak 75 unit dan tempat pemberhentian atau halte sebanyak 501 halte. Informasi dari UPT transportasi umum dari unit yang tersedia hanya 38 unit yang dioperasikan dengan melayani 8 jalur. Potret keberadaan halte yang memprihatinkan juga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari.



Gambar 1. Kondisi Halte Trans Metro Pekanbaru
(Sumber: data olahan peneliti 2023)

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tulisan ini yakni (Akbar, 2021) dengan judul penelitian *Collaborative Governance* Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Di Kota Makassar dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam program psikola di kota Makassar menetapkan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh semua pemerintah, swasta dan masyarakat dalam program pasikola yang sudah terdaftar pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Asaddin, 2019) dengan judul penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan kendaraan angkutan umum di jalan kota pekanbaru belum optimal, dimana hasil tindakan penilaian belum mencapai hasil yang di harapkan, seperti masih banyak ditemukan adanya kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran rute jalan, dan adanya kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban penggunaa jalan bagi pengendara. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo, 2020) dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Transportasi publik (Study BRT Trans Semarang) hasilnya adalah bahwa dalam tahap *Trust building* terjadi konflik internal BLU UPTD Trans semarang, dimana sebagian pihak menolak melaksanakan kebijakan pimpinan. Sedangkan pada tahap Share Understanding terjadi

ketidak sesuaian antara keinginan operator dengan kebijakan yang di tetapkan oleh BLU UPTD Trans Semarang.

Dari beberapa tinjauan literatur singkat dari beberapa penelitian terkait maka penulis ingin melihat perspektif kolaborasi Pemerintah khususnya Kota Pekanbaru dalam mewujudkan transportasi hijau sebagai bentuk perwujudan pelayanan publik untuk masyarakat. *State of art* dalam penelitian ini adalah bagaimana kolaborasi yang digunakan dalam mewujudkan transportasi hijau di Kota Pekanbaru sedangkan novelty yang diharapkan dari penelitian ini yakni mengembangkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan transportasi hijau yang disesuaikan dengan kebutuhan Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan peneliti deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu tulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung, dan yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka namun data tersebut berasal naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya. Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistic atau alamiah. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat "natural" atau wajar, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variable secara lepas, tidak menghubungkan antara variable yang satu dengan variable yang lainnya secara sistematis oleh karena itu metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2019).

Bentuk penelitian berusaha mengumpulkan data melalui wawancara serta dokumentasi dengan terjun langsung ke lapangan untuk menemui informan. Didalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai strategi kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Transportasi Hijau (*Green City*) di Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan didapatkan dilapangan (Jaya, 2020).

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta turun langsung ke lapangan guna melihat segala aspek guna dapat mewujudkan transportasi hijau. Penelitian ini dilakukan peneliti secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu yang dimana, peneliti ini melakukan penelitian di Kota Pekanbaru. Informan pada penelitian ini lebih berfokus kepada stakeholder, swasta dan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kolaborasi pemerintah yakni Dinas Perhubungan, PT Transportasi Pekanbaru Madani dan

masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi hijau.

Teknik analisa data penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jadi setelah data terkumpul maka proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang telah diperoleh kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca, dan diinterpretasikan. Pada hakikatnya merupakan upaya untuk mencari jawaban yang telah dirumuskan. Menurut (Burhan, 2008), proses analisa data kualitatif yaitu mencatat, mengumpulkan dan berfikir untuk menganalisa temuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun (Zaenuri et al., 2021). Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula.

Kolaborasi pemerintah adalah konsep yang melibatkan kerjasama antara berbagai institusi pemerintah, Lembaga dan stakeholder dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif. Menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah consensus bersama. Selanjutnya (Hasna & Darumurti, 2023) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan actor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsesus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik. Karakteristik dan prinsip dalam kolaboratif, menurut (Dorisman et al., 2021) bahwa ada lima (5) komponen utama dalam kolaborasi:

a. *Collaborative culture*

Collaborative culture merupakan Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. disini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang

yang akan berkolaborasi. Dalam konteks transportasi hijau di Pekanbaru mengacu pada pendekatan di mana berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan solusi transportasi yang ramah lingkungan. Ini melibatkan kolaborasi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengurangi dampak lingkungan dari transportasi (Sanchez, 2012).

Collaborative culture Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terlihat dalam beberapa inisiatif dan program yang melibatkan beberapa pihak terkait yang bertujuan meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat, serta memupuk disiplin dalam berlalu lintas. Dinas Perhubungan telah melakukan upaya dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Kawasaki Jepang untuk dapat merealisasikan transportasi hijau di Kota Pekanbaru. pemerintah kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Kawasaki Jepang dengan Njoto yang ada di Nippon Koei Co melalui penandatanganan letter of intent dalam surat perjanjian yang telah di tanda tangani oleh Pemerintah Kota Kawasaki Jepang. Dalam penandatanganan letter of intent (surat pernyataan kerja sama) yang dilakukan di Jatra Hotel pada tanggal 9 Febuari 2023, kerja sama ini bertujuan untuk *Zero Carbon City* dan pengembangan Transportasi ramah lingkungan serta membangun pembangkit energi Listrik terbarukan yang dimana tenaga listrik juga termasuk ke dalam transportasi hijau. Pemerintah Kota Kawasaki Jepang sendiri telah memberikan kajian-kajian mengenai *Eco Transport* kepada Dinas Perhubungan dalam pertemuan dengan menggunakan limbah kelapa sawit dan Pemerintah Kota Kawasaki Jepang telah melakukan perhitungan bagaimana jika bus konvensional diubah dengan menggunakan bahan bakar minyak diubah menjadi dengan menggunakan gas yang terbuat dari limbah kelapa sawit. Dalam kajian yang telah dilakukan sudah ada secara umum namun memiliki kelanjutan seperti pada investasi yang cukup besar yaitu membutuhkan nominal milyaran.

Dinas Perhubungan dalam hal ini belum dapat merealisasikan Transportasi Hijau di Kota Pekanbaru dikarenakan terkendala oleh investasi yang cukup besar namun dari segi teori dan kajian dalam transportasi hijau sendiri sudah memiliki bantuan kerja sama oleh Pemerintah Kota Kawasaki Jepang. Dalam penerapan bus Listrik juga harus di dukung dengan sarana dan prasarana seperti stasiun pengisian bahan bakar untuk charger station nya. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti PT. SPP dalam pengelolaan transportasi umum, meskipun perlu analisis lebih lanjut karena adanya permasalahan dalam pengelolaan tersebut sehingga pengelolaan bus Transportasi Pekanbaru Madani di ambil alih oleh Dinas Perhubungan dan di kelola kembali oleh Dinas Perhubungan dan menjadi Trans Metro Pekanbaru yang dalam surat perjanjiannya



Gambar 2. Surat perjanjian dengan pihak ketiga
(Sumber: Dokumen Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen Dishub dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen transportasi umum di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Transportasi Hijau telah melakukan pembenahan di beberapa fasilitas umum seperti pada halte dan kerja sama dengan beberapa berbagai pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder terkait mengatakan bahwa pengembangan transportasi hijau di Kota Pekanbaru dalam mewujudkan transportasi hijau masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait investasi yang cukup besar. Pemkot Pekanbaru telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang, untuk memperoleh kajian tentang Eco Transport yang menggunakan gas dari limbah. Namun, biaya yang diperlukan untuk merealisasikan transportasi hijau di Kota Pekanbaru masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu strategi yang efektif untuk mengatasi biaya investasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transportasi hijau.

b. *Collaborative Leadership*

Collaborative leadership merupakan suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi (Kramer & Crespy, 2011). Dalam konteks ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait dengan upaya mengatasi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi umum. Dimana Dinas Perhubungan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah setempat, operator transportasi, dan masyarakat, untuk menyediakan angkutan umum

massal yang efektif. Pemimpin kolaboratif dalam dinas perhubungan Pekanbaru berfokus pada komunikasi terbuka, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait dengan pengelolaan transportasi hijau di Kota Pekanbaru telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum, termasuk transportasi hijau. Kolaborasi ini melibatkan berbagai institusi dan stakeholder untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan dan praktis. Dalam konteks ini, kepemimpinan kolaboratif memainkan peran penting dalam mengaktualisasi proses kolaborasi yang adil dan terbuka, serta memastikan kepastian dalam tata kelola transportasi hijau di Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan dan memperluas kualitas layanan dengan terus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan meobilitas Masyarakat serta meningkatkan penumpang Trans Metro Pekanbaru. Adapun surat pelaksana Program Tanggung Jawab (PTJ) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk ketersediaan layanan bus Tracking yaitu:



Gambar 3. Pelaksana CSR perangkat GPS dengan Mitra
(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)

Dinas Perhubungan juga menggunakan teori *Collaborative Governance* untuk mengelola transportasi umum, memastikan bahwa semua stakeholder memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program transportasi hijau. Dalam penerapan bus listrik pemerintah melakukan Kerjasama dengan Program TUMI Mentee Cities Indonesia yang dimana program ini di buat untuk memberikan dukungan teknis dan Pelajaran yang dimana program ini memiliki tujuan untuk dapat mempercepat pengadaan transisi pada bus Listrik dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. TUMI

Mentee Cities Indonesia mengimplementasikan TUMI E-bus untuk dapat mempercepat transisi ke bus listrik di negara-negara berkembang.



Gambar 4. Program Tumi Mentee Cities Indonesia
(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)

Perencanaan dan pengembangan transportasi memiliki beberapa bidang yang berbeda, tetapi untuk meningkatkan kecepatan pembentukan Perda dan merealisasikan transportasi, Dinas Perhubungan harus beroperasi dengan efektif. Adapun beberapa tugas dan fungsi utama yang dapat membantu dalam proses ini seperti Penyusunan Rencana Kerja, Perumusan Kebijakan, pelaksanaan urusan umum, Koordinasi dan Evaluasi dan pengembangan prasarana. Dengan demikian, Dinas Perhubungan dapat bergerak lebih cepat dalam merealisasikan transportasi dengan efektif dan efisien. Dengan dilakukannya collaborative leadership Dinas Perhubungan memiliki hasil yaitu teralisasinya perda transportasi yang dimana dengan teralisasinya perda tersebut Dinas Perhubungan dapat bergerak cepat dalam merealisasikan Transportasi umum tersebut.

c. Strategi Vision

Strategi Vision prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan Kerjasama intern terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar dan tujuan dari Dinas Perhubungan yang memberi pemahaman dan peran nilai-nilai dasar berdasarkan kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat untuk terwujudnya Trasnporasi Hijau (Ilham Nusantara, 2021). Dalam terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, pos, dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal, dan terjangkau. Visi ini bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota serta berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah Kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan dalam strategi pembentukan Transportasi Hijau Dinas Perhubungan melakukan penyusunan Perda dalam pengelolaan 5% APBD ke pengelolaan Transportasi Hijau lalu di kembangkan dengan perbaikan fasilitas umum yang di ada. Dinas Perhubungan telah melakukan Upaya keras untuk meningkatkan transportasi dan angkutan umum di Kota pekanbaru dengan membutuhkan dukungan biaya dan membuat perda yang komprehensif. Dengan langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional transportasi umum massal, serta memastikan bahwa transportasi umum dapat bergerak lancar dan berkelanjutan. Dengan dilakukannya strategi vision dinas perhubungan memiliki hasil yang dimana perda telah ketuk palu dan menunggu proses penomoran perda mengenai pembagian hasil APBD sebesar 5%.

d. *Collaborative Team Process*

Collaborative team process sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri (Gervits et al., 2016). Dalam hal ini yang dikelola baik oleh Dinas Perhubungan maupun masyarakat merupakan dari kerjasama yang memiliki tanggung jawab penuh bagi keberhasilan untuk dapat mewujudkan Transportasi Hijau di Kota Pekanbaru. Dalam *collaborative team process* Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam transportasi hijau melibatkan beberapa tahap:

- 1) Identifikasi Masalah dan Peluang yang dimana menganalisis permasalahan transportasi hijau seta peluang-peluang yang ada di Kota Pekanbaru.
- 2) Debat Strategi yang dimana mendiskusikan strategi untuk meningkatkan transportasi hijau, termasuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan.
- 3) Perencanaan Aksi Kolaboratif yang dimana merencanakan aksi kolaboratif untuk melaksanakan strategi yang telah dibahas, seperti pengembangan sistem transportasi hijau dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti organisasi swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan transportasi hijau. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan penting, seperti inisiasi dan motivasi, media komunikasi, analisis bersama, negosiasi, dan pembangunan kapasitas perubahan. Dinas

Perhubungan harus memenuhi beberapa prinsip kolaborasi, seperti transparansi, saling menghormati, pembagian peran yang bertanggung jawab, hubungan kerja yang efektif, dan memperhatikan kepentingan yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan kolaboratif dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dinas Perhubungan dapat menggunakan berbagai tipe kolaborasi, seperti *aliansi strategis, joint ventures, cooperative arrangements, virtual collaboration, dan integration*. Pemilihan tipe kolaborasi yang tepat akan membantu dalam mencapai tujuan transportasi hijau. Dengan mengikuti teori-teori ini, Dinas Perhubungan di Pekanbaru dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mewujudkan transportasi hijau yang ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Kota, PT Transportasi Pekanbaru Madani, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan transportasi hijau yang lebih baik. Adapun dinas perhubungan melakukan beberapa rapat penting untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat merealisasikan transportasi yang ramah lingkungan. Dinas Perhubungan juga melakukan realisasi untuk dapat memasukan Transportasi Hijau sebagai kewajiban dasar. Dinas perhubungan melakukan kerja mengenai eco dan melakukan pengesahan perda demi terwujudnya transportasi hijau yang ramah lingkungan.

Transportasi umum memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perlu diintegrasikan ke dalam kewajiban dasar melalui perjuangan dan mendorong pimpinan baik kepala dinas maupun kepala daerah untuk dapat mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan. Dengan dilakukanya collaborative team proses dinas perhubungan memiliki hasil yang dimana Upaya dinas perhubungan dalam pembuatan perda mengenai pengikut sertaan transportasi yang ramah lingkungan dalam kewajiban dasar dan non dasar dari APBD dan APBN yang dimana Dinas Perhubungan berhasil menggolkan peraturan daerahnya.

e. *Collaborative Struture*

Collaborative Structure pemahaman dari dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif (Gacitúa et al., 2021). Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya. Pembinaan dari Dinas Perhubungan terutama dari informasi guna untuk dapat memastikan keberhasilan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat dengan terwujudnya Transportasi Hijau di Kota Pekanbaru. Dalam *Collaborative structure* Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam transportasi hijau melibatkan beberapa elemen penting yaitu koordinasi dengan pihak berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat untuk mencapai tujuan transportasi hijau yang lebih baik, Dinas Perhubungan mengembangkan desain institusional yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkolaborasi, kepemimpinan yang fasilitatif membantu memfasilitasi proses kerja sama dan memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam pengembangan transportasi hijau dan Dinas Perhubungan melaksanakan proses kolaboratif yang terstruktur untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait transportasi hijau dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan transportasi yang ramah lingkungan banyak Upaya yang harus dilakukan yang dimana Dinas Perhubungan sendiri memiliki fokus pada skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Adapun jumlah pendapatan BLUD UPT PTP yaitu:

REALISASI PENDAPATAN 2023				
▪ Jumlah Pendapatan BLUD UPT PTP Tahun 2023				
NO	BULAN	PENDAPATAN BUS TMP	SEWA BUS	LAJAN-LAIN
1	JANUARI	Rp 553.775.000	-	Rp 252.063
2	FEBRUARI	Rp 511.416.000	Rp 8.400.000	Rp 369.272
3	MARET	Rp 534.779.000	Rp 13.800.000	Rp 517.598
4	APRIL	Rp 419.814.000	-	Rp 480.736
5	MEL	Rp 502.501.000	-	Rp 298.534
6	JUNI	Rp 406.833.000	-	Rp 205.302
7	JULI	Rp 389.902.000	Rp 3.000.000	Rp 220.456
8	AGUSTUS	Rp 353.283.000	-	Rp 179.509
9	SEPTEMBER	Rp 369.293.000	Rp 3.000.000	Rp 46.182
10	OKTOBER	Rp 400.674.000	Rp 3.000.000	Rp 68.501
11	NOVEMBER	Rp 394.869.000	Rp 9.000.000	Rp 47.735
12	DESEMBER	Rp 360.299.000	-	Rp 51.235
TOTAL		Rp 5.197.438.000	Rp 40.200.000	Rp 2.737.123

Gambar 5. Jumlah pendapatan BLUD UPT PTP 2023

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)

Dengan adanya skema pendapatan BLUD diharapkan Trans Metro Pekanbaru dapat mandiri seperti pada Trans Jakarta. Dalam pengelolaan Transportasi Hijau Dinas Perhubungan berfokus pada trans metro Pekanbaru itu sendiri yang dimana dishub sebagai operator yaitu skema BLUD di pengelola trans metro Pekanbaru, dan mengoptimalkan pengelolaan yang lebih baik lagi dari pengelolaan sebelumnya dan mengupayakan pengelolaan ini seperti Trans Jakarta, dimana perubahan ini akan meningkatkan efisiensi dan profesionalitas dalam pengelolaan transportasi umum di Pekanbaru. Dengan demikian survei lapangan pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan transportasi hijau di pekanbaru.

Dinas Perhubungan seharusnya menggunakan model *collaborative governance* yang

dimana ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi masalah transportasi umum dengan tahapan-tahapan yang dapat membantu Dinas perhubungan mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan seperti identifikasi masalah transportasi umum di Kota Pekanbaru dan kesempatan yang ada untuk meningkatkan layanan transportasi hijau. Mendiskusikan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah transportasi umum dan meningkatkan layanan transportasi hijau. Membuat rencana aksi yang melibatkan semua pihak untuk meningkatkan layanan transportasi hijau, seperti pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan peningkatan infrastruktur transportasi umum.

Dengan model kolaborasi pemerintah ini Dinas Perhubungan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan transportasi hijau di Kota Pekanbaru. Dengan dilakukannya *collaborative structure* dinas perhubungan memiliki hasil yang dimana Dinas Perhubungan sebagai operator dan melibatkan pihak yang profesional di bidangnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil dari analisis data penelitian, maka kesimpulan yang dapat diberikan dari penelitian terkait Kolaborasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Transportasi Hijau di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pengembangan Transportasi Hijau melalui berbagai inisiatif kerja sama dengan berbagai pihak seperti, IMT-GT, Asian Development, PT. Transportasi Pekanbaru Madani, Pemerintah Kawasaki Jepang, dan program TUMI Mentee Cities Indonesia yang telah melahirkan rencana untuk meningkatkan penggunaan Transportasi Hijau dan Dinas perhubungan Telah melakukan pembenahan dimana-mana seperti pada beberapa fasilitas umum yang ada di kota pekanbaru. Kemitraan dengan lembaga internasional seperti IMT-GT dan Asian Development Bank telah memberikan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi hijau. Kolaborasi dengan pihak swasta seperti PT. Transportasi Pekanbaru Madani juga menunjukkan adanya sinergi yang positif antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong investasi di bidang transportasi berkelanjutan. Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Kota Kawasaki Jepang dalam program TUMI Mentee Cities Indonesia telah menghasilkan rencana aksi yang konkret untuk meningkatkan penggunaan transportasi hijau di Kota Pekanbaru. Rencana ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan infrastruktur yang mendukung transportasi ramah lingkungan hingga peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya transportasi berkelanjutan. Upaya pembenahan fasilitas umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru juga merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan transportasi hijau. Dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti jalur sepeda, halte bus yang nyaman, dan area parkir sepeda, pemerintah kota semakin mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum atau sepeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2021). *Collaborative Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Asaddin, K. H. (2019). *Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Burhan, B. (2008). Analisa Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jakarta: Raja*.
- Creswell. (2019). Metode Penelitian Menurut Creswell. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 10–12.
- Dorisman, A., Suradji, A., & Setiawan, R. (2021). Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Collaboration Between Stakeholders In Traffic Accident Management ada hasil atau perubahan yang signifikan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 70–83.
- Fajar, M., & Sujianto, A. (2016). Pelaksanaan Koordinasi Dalam Mewujudkan Green City. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1).
- Gacitúa, R., Astudillo, H., Hitpass, B., Osorio-Sanabria, M., & Taramasco, C. (2021). Recent models for collaborative e-government processes: A survey. *IEEE Access*, 9, 19602–19618.
- Gervits, F., Eberhard, K., & Scheutz, M. (2016). Team communication as a collaborative process. *Frontiers in Robotics and AI*, 3, 62.
- Handoyo, F., Hakim, L., & Leksono, A. S. (2016). Analisis potensi ruang terbuka hijau Kota Malang sebagai areal pelestarian burung. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*.
- Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative governance dalam mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal* <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/24210>
- Ilham Nusantara, A. (2021). *Strategi Arab Saudi Mewujudkan Diri Sebagai Destinasi Wisata Melalui Saudi Vision 2030*. Universitas Andalas.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kramer, M. W., & Crespy, D. A. (2011). Communicating collaborative leadership. *The*

Leadership Quarterly, 22(5), 1024–1037.

Muthia, R. (2018). *Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota Tahun 2018*. 6, 1–26.

Nugroho, D., & Syaodih, E. (2013). Strategi Peningkatan Kualitas Empat Atribut Green City Di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 13(2), 124911.

Sanchez, M. (2012). A collaborative culture. *Od Practitioner*, 44(2), 7–12.

Wibowo, A. N. F. A. (2020). Collaborative governance dalam pelayanan transportasi publik (study BRT Trans Semarang). *Syntax Literate*, 5(3), 1–18.

Zaenuri, M., Musa, Y., & Iqbal, M. (2021). Collaboration Governance In The Development Of Natural Based Tourism Destinations. *Journal of Government and Civil*
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/2839>